

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Kamis-Jumat, 14-15 Maret 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman, 10)	Kamis, 14 Maret 2019	Pulau Moyo yang Minim Fasilitas	Keindahan Pulau Moyo yang terletak di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ternyata masih menyisakan cerita miris. Suasana pantai dan cantiknya air terjun Mata Jitu yang menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata, tidak lantas menjadikan pulau ini bergelimang fasilitas dan infrastruktur penunjang.
2	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Kamis, 14 Maret 2019	Penyiapan SPAM Karian Masih Terganjil	Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum menyatakan bahwa penyiapan proyek SPAM Karian terganjal kepastian tariff dan kesiapan lahan.
3	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Kamis, 14 Maret 2019	Asing Mundur, Konsorsium Lokal Melaju	Badan Pengatur Jalan Tol mengungkapkan bahwa peserta tender investasi proyek jalan tol Semarang – Demak menyisakan dua konsorsium lokal dari empat konsorsium yang lulus prakualifikasi.
4	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Kamis, 14 Maret 2019	Operasional BP Tapera Perlu 3 Bulan	Kementerian PUPR segera melantik pengurus Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, tetapi operasional badan tersebut masih harus menunggu 3 bulan kemudian
5	Kompas (Halaman, 18)	Kamis, 14 Maret 2019	Berita Foto	Pembangunan Proyek Jalan Tol Kunciran-Serpong
6	Media Indonesia (Halaman, 14)	Kamis, 14 Maret 2019	Realisasi Program Air Bersih Butuh Kerja Sama Swasta	Kementerian PUPR menilai peran serta pihak swasta sangat krusial dalam partisipasi penyediaan program air bersih.
7	Tempo (Halaman, 6)	Jumat, 15 Maret 2019	KEK Tanjung Kelayang Beroperasi	Presiden Joko Widodo meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang di Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan KEK tersebut dibangun untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta meningkatkan investasi.
8	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 15 Maret 2019	Kontrak Bengkulu – Lubuk Linggau Ditandatangani	Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan direksi PT Utama Karya Tbk. Akan menandatangani perjanjian perusahaan jalan tol Bengkulu – Lubuk Linggau.
9	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 15 Maret 2019	Budapest Waterworks Investasi Proyek Air Bersih	Perusahaan pengolahan air bersih asal Hungaria, Budapest Waterworks, mulai melakukan pembangunan proyek sistem air bersih di 34 wilayah di Indonesia.
10	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 15 Maret 2019	Berita Foto	Sejumlah kendaraan melintasi ruas tol Trans – Jawa di Kota Semarang, Jawa Tengah.
11	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Jumat, 15 Maret 2019	Pesisir Selatan Anggarkan Rp 15 Miliar	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat mengalokasikan anggaran Rp 15 miliar untuk pembebasan lahan bagi pengembangan kawasan Ekonomi Khusus Mandeh.
12	Bisnis Indonesia (Halaman, 10)	Jumat, 15 Maret 2019	Jalan Rusak Sampai Jauh	Provinsi Sumatera Selatan yang dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya telah dikenal sebagai kawasan perdagangan sejak zaman daulu. Provinsi ini juga memiliki banyak tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi seperti Sungai Musi, Jembatan Ampera, Pulau Kemaro, Danau Ranau hingga kota Pagaralam. Sayangnya, provinsi ini juga dihinggapi masalah klasik yaitu jalan rusak yang bisa menurunkan minat perdagangan dan pariwisata.

Judul	Pulau Moyo yang Minim Fasilitas	Tanggal	Kamis, 14 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 10)		
Resume	Keindahan Pulau Moyo yang terletak di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ternyata masih menyisakan cerita miris. Suasana pantai dan cantiknya air terjun Mata Jitu yang menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata, tidak lantas menjadikan pulau ini bergelimang fasilitas dan infrastruktur penunjang.		

Pulau Moyo yang Minim Fasilitas

redaksi@bisnis.com

Keindahan Pulau Moyo yang terletak di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ternyata masih menyisakan cerita miris. Suasana pantai dan cantiknya air terjun Mata Jitu yang menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata, tidak lantas menjadikan pulau ini bergelimang fasilitas dan infrastruktur penunjang.

Infrastruktur dasar seperti jaringan listrik, akses jalan, dan dermaga, serta jaringan telekomunikasi menjadi batu sandungan perkembangan ekonomi di pulau yang terletak 2,50 km di utara Pulau Sumbawa ini.

Keindahan alam Pulau Moyo memang sudah terkenal hingga mancanegara. Bahkan, Lady Diana pernah singgah dan menikmati keindahan pulau. Teranyar pasangan selebritas Korea Selatan, Rain dan Kim Tae Hee pun memilih Pulau Moyo sebagai lokasi bulan madu. Pulau ini dikenal dengan keeksotisan alam dan suasana yang tenang. Cocok bagi mereka yang ingin mencari suasana baru dan

menikmati alam.

Air terjun Mata Jitu berbentuk seperti anak tangga dengan air berwarna biru yang seakan membentuk kolam renang alami. Aliran air yang tidak terlalu deras membuat air terjun ini aman untuk sekadar digunakan bermain air.

Listrik sebagai salah satu infrastruktur penunjang pariwisata di pulau tersebut nyatanya hanya menyala pada pukul 18.00 hingga pukul 06.00. Pembangkit listrik tenaga diesel milik PT PLN (Persero) tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat pulau sepanjang hari.

Suhardi, Kepala Desa Labuhan Aji Pulau Moyo, mengatakan bahwa saat ini sudah ada pembangkit listrik tenaga diesel milik PLN, sayangnya kapasitas pembangkit tergolong kecil dan tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik sepanjang hari.

Menurut Suhardi, masyarakat yang paling membutuhkan listrik adalah warga yang membuka usaha penginapan dan juga warung makan. Listrik tersebut diperlukan untuk lemari pendingin penyimpanan bahan makanan.

"Kalau siang tidak ada listrik. Malam hanya menyala dari pukul 6 sore sampai pukul 6 pagi itu saja," ujar Suhardi. Jalan keluar yang dilakukan adalah menggunakan generator listrik atau genset milik pribadi warga apabila ada wisatawan yang menginap.

Dalam setahun, paling tidak ada sekitar 1.000 wisatawan yang berkunjung ke Pulau Moyo.

Selain listrik, jaringan telekomunikasi pun sangat minim. Hanya ada satu *provider* telekomunikasi yang bisa berfungsi di pulau tersebut, yaitu Telkomsel. Sayangnya, warga Desa Sebotok yang bertetangga dengan Desa Labuhan Aji, belum bisa menikmati jaringan telekomunikasi hingga saat ini.

"Hanya Labuhan Aji bagian barat yang bisa dapat sinyal HP [*handphone*]. Di tempat lain, sama sekali tidak ada sinyal," ungkapnya.

Lain lagi cerita tentang infrastruktur jalan dan dermaga. Sebagai satu-satunya akses menuju Pulau Moyo, kondisi dermaga yang ada saat ini masih kurang mumpuni. Jalan menuju objek wisata andalan Air Terjun Mata Jitu pun masih berupa jalan tanah.

Perlu waktu 2 jam bagi wisatawan untuk tiba ke air terjun dengan berjalan kaki dari pelabuhan atau dermaga. Namun, masih ada opsi untuk menggunakan ojek dengan tarif Rp100.000 per motornya untuk rute bolak balik dengan jalur yang dilalui berupa jalan tanah yang licin dan berlumpur di musim hujan.

LAYANAN KEUANGAN

Keberadaan layanan akses keuangan dan penukaran uang asing diperlukan di setiap lokasi wisata. Sayangnya, kedua layanan tersebut belum bisa didapatkan di Pulau Moyo.

Wisatawan mancanegara yang berkunjung masih melakukan transaksi menggunakan mata uang asing lantaran tidak ada fasilitas penukaran uang di pulau tersebut.

Ketua Organisasi Ojek Pulau Moyo Ahmadin mengungkapkan bahwa dirinya masih menerima pembayaran dalam bentuk mata uang asing. Hal tersebut dilakukan lantaran tidak ada pilihan lain yang dimilikinya.

Menurutnya, lebih baik menerima dalam bentuk uang asing daripada

tidak mendapatkan bayaran sama sekali.

"Kami terima dulu, nanti tukar di Sumbawa. Kalau tidak masak tidak bayar," ujarnya.

Sebenarnya, ada satu lokasi penukaran mata uang asing atau *money changer* di pulau tersebut. Lokasinya berada di dalam kawasan resor bintang 5 dan tidak semua orang bisa masuk ke area tersebut.

Selain itu, lokasinya yang terbilang jauh dari Desa Labuhan Aji tempat kapal umum merapat menjadi alasan lain sulitnya akses penukaran uang asing di tempat ini.

Deputi Kepala Bank Indonesia NTB Bidang Sistem Pembayaran Ocky Ganesia mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pendekatan dan juga sosialisasi persuasif kepada masyarakat, khususnya yang berada di tempat wisata di pulau-pulau kecil.

"Memang kami akui sulit, tetapi akan kami terus lakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan pelaku wisata agar menggunakan rupiah sebagai alat transaksi yang sah," ujar Ocky. (1/16)

Judul	Penyiapan SPAM Karian Masih Terganjil	Tanggal	Kamis, 14 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum menyatakan bahwa penyiapan proyek SPAM Karian terganjal kepastian tariff dan kesiapan lahan.		

Penyiapan SPAM Karian Masih Terganjil

Bisnis, JAKARTA — Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum menyatakan bahwa penyiapan proyek SPAM Karian terganjal kepastian tarif dan kesiapan lahan. Proyek ini merupakan salah satu proyek perusahaan SPAM yang digagas badan usaha atau *unsolicited*.

Anggota BPPSPAM Unsur Penyelenggara Henry M. Limbong mengatakan bahwa hingga kini konsorsium K Water dan PT Adhi Karya Tbk. (ADHI) belum mengajukan studi kelayakan proyek SPAM Karian. Padahal, semula studi kelayakan diharapkan rampung pada Oktober 2018.

Dia menerangkan bahwa penyusunan studi kelayakan memang mencakup banyak aspek. Secara umum, studi harus menunjukkan sebuah proyek dari aspek hulu hingga hilir layak digarap.

“Jadi, tidak hanya membangun WTP [*water treatment plant*], tapi juga kesiapan *oftaker* [pembeli],” jelasnya kepada *Bisnis*, Rabu (13/3).

Menurutnya, tarif air baku yang akan dijual kepada perusahaan daerah air minum daerah (PDAM) harus terjangkau sehingga memenuhi aspek kelayakan usaha bagi kedua belah pihak. Bila tarif air baku mahal, PDAM akan kesulitan menjual air dengan harga terjangkau kepada pelanggan.

Selain tarif, ketersediaan lahan juga perlu menjadi perhatian. Tak hanya bagi badan usaha pelaksana yang akan membangun instalasi pengolahan air,

menurut Henry, para pembeli air baku juga perlu menyiapkan lahan untuk penampungan.

SPAM Karian akan mengandalkan pasokan air dari Bendungan Karian di Kabupaten Lebak. Per Desember 2018, progres konstruksi bendungan telah mencapai 55% ditargetkan rampung pada Oktober 2019.

Air baku dari Bendungan Karian akan dialirkan melalui jaringan perpipaan sepanjang 47,90 kilometer. Pasokan air diharapkan bisa memenuhi kebutuhan air di Tangerang dan DKI Jakarta sehingga bisa mengurangi penggunaan air tanah.

Direktur Keuangan ADHI Entus Asnawi sebelumnya mengatakan bahwa perseroan masih membahas beragam usulan dalam prakarsa proyek SPAM Karian. Perseroan menyiapkan Rp1 triliun untuk investasi di SPAM Karian.

Dalam proyek SPAM Karian, konsorsium yang digalang Adhi Karya berpeluang memenangi lelang karena proyek ini merupakan usulan badan usaha. Pada umumnya, pemrakarsa akan mendapat hak istimewa, salah satunya hak menyamakan penawaran.

Bila rencana bisnis Adhi Karya di proyek SPAM Karian terwujud, proyek itu akan menjadi portofolio kedua perseroan di sektor air minum.

Sebelumnya, Adhi Karya mengakuisisi 25% saham EBD Paragon Singapore Pte. Ltd. di PT Perusahaan Air Indonesia Amerika. Perusahaan ini beroperasi di Lombok Tengah. (*Rivki Maulana*)

Judul	Asing Mundur, Konsorsium Lokal Melaju	Tanggal	Kamis, 14 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Badan Pengatur Jalan Tol mengungkapkan bahwa peserta tender investasi proyek jalan tol Semarang – Demak menyisakan dua konsorsium lokal dari empat konsorsium yang lulus prakualifikasi.		

► TENDER TOL SEMARANG-DEMAK

Asing Mundur, Konsorsium Lokal Melaju

Bisnis, JAKARTA — Badan Pengatur Jalan Tol mengungkapkan bahwa peserta tender investasi proyek jalan tol Semarang—Demak menyisakan dua konsorsium lokal dari empat konsorsium yang lulus prakualifikasi.



Krisna P. Kihanti & Rivki Maulana
relaksi@bisnis.com

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parihesis menuturkan bahwa dua konsorsium lokal peserta tender tersebut melaju ke tahap berikutnya, sedangkan dua konsorsium asing tidak mengajukan dokumen lebih lanjut.

"Sekarang sedang dalam pembahasan teknis panitia lelang, ada dua [yang melaju] keuahi yang asing. [Konsorsium asing] enggak masukkan [dokumen tender]. Yang *shortlist* diundang kan empat, itu sisa dua," tuturnya, Rabu (13/3). Sebelumnya, ada empat konsorsium lulus tahap prakualifikasi dan diundang untuk memasukkan dokumen penawaran.

Pertama, konsorsium PT Jasa Marga Tbk., PT Waskita Toll Road, PT Adhi Karya Tbk., dan PT Brantas Abipraya.

Kedua, konsorsium PT PP Tbk., PT Wijaya Karya, PT Misi Mulia Metrical.

Ketiga, PT China Harbour Indonesia dan keempat adalah konsorsium Sinohydro Corporation Limited.

Apabila dua konsorsium asing tidak dikotertakan, saat ini tersisa dua konsorsium lokal yakni konsorsium PT Jasa Marga Tbk. serta konsorsium PT PP Tbk.

Danang menambahkan bahwa untuk pengumuman pemenang tender, BPJT masih menunggu dari panitia lelang. "Jadi, kalau proses biasanya itu 6 bulan selesai."

► Pengumuman pemenang tender proyek jalan tol Semarang—Demak, masih menunggu dari panitia lelang.

► Kelanjutan proyek jalan tol Pandaan—Malang bakal bergantung pada rekomendasi Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Pembangunan jalan tol Semarang—Demak ini menjadi menarik karena proyek ini tidak hanya berkaitan dengan pengoperasian jalan tol, tetapi juga terintegrasi dengan tanggul laut Kota Semarang sebagai upaya untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim yang mengakibatkan kenaikan muka air laut maupun penurunan muka tanah di wilayah Semarang dan Demak.

BPJT menargetkan pembangunan jalan tol Semarang—Demak sepanjang 27 kilometer bisa dimulai pada tahun ini. Keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan menambah kapasitas jaringan jalan yang sudah ada untuk melayani kawasan utara Jawa.

Pembangunan jalan tol dengan nilai investasi sekitar Rp15,3 triliun ini ditargetkan berlangsung selama 2 tahun.

Adapun, lahan yang dibutuhkan untuk proyek itu adalah 1.887.000 meter persegi yang pengadaannya dibagi menjadi dua seksi, yaitu seksi 1 di Kota Semarang dan seksi 2 di Kabupaten Demak.

CAGAR BUDAYA

Pada bagian lain, Danang menegaskan bahwa kelanjutan proyek jalan tol Pandaan—Malang bakal bergantung pada rekomendasi Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Pengerjaan proyek tersebut dihentikan sementara seiring dengan penemuan struktur bangunan yang diduga struktur cagar budaya.

BPJT tengah menunggu rekomendasi teknis dari Balai Pelestarian Cagar Budaya terkait dengan penemuan struktur bangunan tua di KM 37+700 proyek jalan tol Pandaan—Malang.

"Mudah-mudahan dari mereka [BPCB] cepat keluar [rekomendasi teknis]," ujarnya kepada *Bisnis*, Rabu (13/3).

Undang-Undang No. 11/2010 tentang Cagar Budaya mengatur mengenai benda, struktur, maupun bangunan cagar budaya.

Konsorsium Dalam Negeri Berebut Tol Semarang-Demak

Sempat diulang karena lingkup pekerjaan proyek dipadukan dengan pembangunan tanggul laut Kota Semarang, lelang proyek jalan tol Semarang—Demak hampir mencapai titik akhir. Saat ini, tersisa dua konsorsium lokal dari empat konsorsium yang bertarung memperebutkan proyek jalan tol tersebut. Dua konsorsium lainnya yang tidak memasukkan dokumen adalah asing.

Panjang Ruas Tol
26,80 km

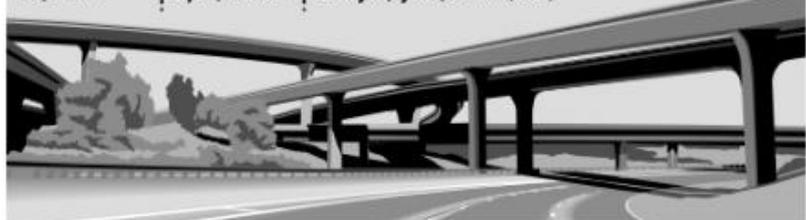
Biaya Investasi
Rp15,34 triliun

Skema Investasi
Bangun, guna, serah (BOT)

Hasil Prakualifikasi (Desain Proyek Beserta Tanggul) 4 konsorsium lulus

- Konsorsium pertama: PT Jasa Marga Tbk., PT Waskita Toll Road, PT Adhi Karya Tbk., dan PT Brantas Abipraya.
- Konsorsium Kedua: PT PP Tbk., PT Wijaya Karya, PT Misi Mulia Metrical.
- Konsorsium Ketiga: PT China Harbour Indonesia.
- Konsorsium Keempat: Sinohydro Corporation Limited.

Sumber: BPJT, Kementerian PUPR, Balai Pelestarian Cagar Budaya



Beleid tersebut menyebutkan bahwa ada empat kriteria yang harus dipenuhi agar suatu benda, struktur, atau bangunan digolongkan sebagai cagar budaya.

Kemudian adalah usia benda mencapai 50 tahun atau lebih dan mempunyai arti khusus bagi sejarah ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan.

Sementara itu, PT Jasamarga Pandaan

Malang, badan usaha pemegang konsesi jalan tol Pandaan—Malang, menyatakan bahwa hingga saat ini struktur bangunan tua yang ditemukan belum dipastikan tergolong cagar budaya.

Direktur Utama PT Jasamarga Pandaan Malang Agus Purnomo mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan penemuan tersebut pada 6 Maret 2019.

Lokasi penemuan terletak di Desa Sekarpuro, Kelurahan Madyepuro, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Lokasi penemuan struktur bangunan tua, menurut Agus, terdapat di *right of way* sekitar 15 meter dari jalan utama. Di lokasi tersebut, juga ditemukan tumpukan batu merah yang terpendam satu meter dari permukaan tanah. □

Judul	Operasional BP Tapera Perlu 3 Bulan	Tanggal	Kamis, 14 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Kementerian PUPR segera melantik pengurus Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, tetapi operasional badan tersebut masih harus menunggu 3 bulan kemudian		

Operasional BP Tapera Perlu 3 Bulan

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera melantik pengurus Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, tetapi operasional badan tersebut masih harus menunggu 3 bulan kemudian.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengharapkan, pelantikan BP Tapera dapat dipercepat agar skema pembiayaan perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil itu bisa segera diaktifkan.

"Kalau *delay* terus [pelantikannya], *enggak* jalan-jalan BP Tapera-nya, target diaktifkannya juga jadi belum ada karena belum dilantik pengurusnya," katanya kepada *Bisnis*, Rabu (13/3).

Setelah dilantik, komisioner yang telah dipilih harus bekerja terlebih dahulu sebelum mengoperasikan BP Tapera. Komisioner dan deputi harus terlebih dahulu melakukan persiapan dengan membentuk organisasi di bawahnya.

"Langkah awal setelah dilantik adalah membentuk organisasinya dulu. Komisioner dan deputinya harus memutuskan mau ada direktur atau divisi apa saja. Orangnya terserah mereka dan itu harus segera dilakukan setelah dilantik," jelasnya.

Kemudian, komisioner dan deputi juga harus segera menunjuk bank kustodian, manajer investasi, dan segera menetapkan dan menunjuk bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR), memindahkan dana dari yang sebelumnya disalurkan ke tabungan perumahan (taperum) yang ada di Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) sebesar Rp10,20 triliun.

Penyusunan organisasi menjadi tugas komisioner dan deputinya karena tidak diatur dalam undang-undang. Proses penyusunannya berdasarkan UU diatur sepanjang 3 bulan sejak ditetapkannya komisioner.

Adapun, Bapertarum yang telah dibubarkan pada April

tahun lalu, masih diaktifkan sementara untuk melayani masa transisi.

"Ini supaya eks Bapertarum masih tetap bekerja, untuk melaksanakan kegiatan, tetapi tidak penuh seperti dulu. Hanya untuk mengelola data PNS dan mengembalikan hak pensiun, kan iuran tetap berjalan, yang pensiun juga tiap bulan ada, ini yang harus diurus sama eks Bapertarum," jelas Adang.

Iuran yang masih dipotong dari gaji PNS setelah Bapertarum dibubarkan, dialirkan ke kas negara. Proses rekonsiliasinya harus tetap dilakukan dengan mencatatkan dana yang masuk dari sekitar 4,5 juta PNS.

"Untuk besaran kas negara dari PNS setelah pembubaran Bapertarum saya kurang tahu detail jumlahnya karena ada yang di catatan Kemenkeu, ada yang di Kementerian PUPR," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa dirinya akan melantik pengurus BP Tapera pada

pekan depan.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 10/2019, Presiden Joko Widodo mengangkat bekas Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Adi Setianto sebagai komisioner.

Selanjutnya, Eko Ariantoro yang pernah menjabat Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK diangkat sebagai Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera.

Sementara itu, eks Direktur Dapen Bank Mandiri Gatut Subadio ditunjuk sebagai Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera.

Dua pejabat BP Tapera lainnya berasal dari lingkungan Kementerian PUPR. Mereka adalah Arief Baginda Siregar dan Nostra Tarigan. Arief pernah menjabat Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS sedangkan Nostra merupakan Direktur Operasi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. (*Mutiara Nabila*)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 14 Maret 2019
Media	Kompas (Halaman, 18)		
Resume	Pembangunan Proyek Jalan Tol Kunciran-Serpong		

Proyek Jalan Tol Kunciran-Serpong



KOMPAS/PRIYOMBODO

Proyek pembangunan Jalan Tol Kunciran-Serpong di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (13/3/2019). Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) II yang menghubungkan Bandara Soekarno Hatta-Kunciran-Serpong-Cinere-Jagorawi-Cibitung-Cilincing-Tanjung Priok.

Judul	Realisasi Program Air Bersih Butuh Kerja Sama Swasta	Tanggal	Kamis, 14 Maret 2019
Media	Media Indonesia (Halaman, 14)		
Resume	Kementerian PUPR menilai peran serta pihak swasta sangat krusial dalam partisipasi penyediaan program air bersih.		

Realisasi Program Air Bersih Butuh Kerja Sama Swasta

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menilai peran serta pihak swasta sangat krusial dalam partisipasi penyediaan program air bersih. Nilai proyek pembangunan program air bersih yang sangat tinggi menjadi alasan utama pemerintah memilih menjalin kerja sama dengan swasta.

"Kebutuhan untuk pembiayaan tidak sedikit dan lebih baik di-KPBU-kan. Dengan kerja sama pemerintah dan badan usaha akan lebih cepat, lebih banyak yang mengawasi dan lebih *save*," kata Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono di sela peninjauan proyek tol Aceh-Sigli, Senin (11/3) sore.

Proyek penyediaan air bersih merupakan salah satu program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang belum dapat memenuhi target hingga 2019 berakhir. Saat ini proyek air bersih nasional baru mencapai angka 76% dari target yang dicanangkan pemerintah.

Selain proyek air bersih, ada tiga program RPJMN lain yang targetnya sulit tercapai. Tiga program tersebut ialah proyek pengendalian banjir, sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan penyediaan hunian layak.

Kendati demikian, Basuki menilai hal itu bukan bentuk kegagalan pemerintah, melainkan program yang perlu diperhatikan tahun depan.

Soal penyediaan air bersih, peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Ainul Huda mengatakan pengelolaannya harus dilihat seperti dalam penyediaan listrik atau pengelolaan sumber daya alam lainnya yang telah dilakukan selama ini. Ada kontrol negara dan peran swasta yang dilibatkan.

Menurutnya, akan sangat rugi bagi pemerintah apabila mengeluarkan partisipasi

swasta dalam penyediaan air bersih. Apalagi selama ini kontrol pengelolaan air baku masih dalam tangan pemerintah dan penetapan tarif juga dilakukan gubernur atau kepala daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.

"Kalau misalnya ada salah satu pihak yang dirugikan dalam kerja sama, ini lebih kepada soal *business to business* dan terbuka untuk dinegosiasi ulang," kata Ainul.

"Kebutuhan untuk pembiayaan tidak sedikit dan lebih baik di-KPBU-kan. Dengan kerja sama pemerintah dan badan usaha akan lebih cepat, lebih banyak yang mengawasi dan lebih *save*."

Basuki Hadimuljono

Menteri PU-Pera

Masalah negosiasi ulang pernah dilakukan dalam kasus PAM Jaya dan PT Aetra. Pada 2012, Aetra bersedia untuk menurunkan perhitungan *internal rate of return* (IRR) dari 22% menjadi sekitar 15,8%. Bahkan pada 2015, PAM Jaya berhasil melunasi utang kepada Bank Dunia Rp2,4 triliun yang sebagian dananya diambil dari penyisihan hasil kerja sama dengan Aetra Rp1,15 triliun.

Ainul mengatakan kondisi PDAM di berbagai daerah dalam kondisi kurang sehat sehingga butuh upaya panjang apabila penyediaan air bersih disandarkan sepenuhnya pada PDAM. (E-1)

Judul	KEK Tanjung Kelayang Beroperasi	Tanggal	Jumat, 15 Maret 2019
Media	Tempo (Halaman, 6)		
Resume	Presiden Joko Widodo meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang di Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan KEK tersebut dibangun untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta meningkatkan investasi.		

KEK Tanjung Kelayang Beroperasi

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI



Presiden Joko Widodo meresmikan pengembangan Bandara Dipati Amir di Pangkalpinang, Bangka Belitung, kemarin.

Presiden Joko Widodo meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang di Belitung, Provinsi Bangka Belitung, kemarin. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan KEK tersebut dibangun untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta meningkatkan investasi.

Darmin mengatakan sampai saat ini sudah 12 KEK yang ditetapkan. Delapan di antaranya KEK manufaktur dan empat lainnya kepariwisataan. KEK yang sudah resmi beroperasi adalah Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Palu, Mandalika, Galang Batang, dan Arun Lhokseumawe.

Darmin mengatakan KEK Tanjung Kelayang di-proyeksikan dapat menyerap 23.645 tenaga kerja. Luasnya 324 hektare dengan target investasi Rp 10,3 triliun.

● HENDARTYO HANGGI

Judul	Kontrak Bengkulu – Lubuk Linggau Ditandatangani	Tanggal	Jumat, 15 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan direksi PT Utama Karya Tbk. Akan menandatangani perjanjian perusahaan jalan tol Bengkulu – Lubuk Linggau.		

Kontrak Bengkulu–Lubuk Linggau Ditandatangani

Bisnis, JAKARTA —
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan direksi PT Utama Karya Tbk. akan menandatangani perjanjian perusahaan jalan tol Bengkulu–Lubuk Linggau.

Kelvin M. Kusniel
AGUS/PUTRA/ISTOCK/COM

Kepala Dintasi Pengembangan Jalan Tol PT Utama Karya Agung Fajarwanto mengatakan bahwa jalan tol Bengkulu–Lubuk Linggau bukan merupakan tugas tambahan yang harus dilaksanakan oleh perseroan.

"Besok [hari ini] atau Sabtu rencananya [dilakukan penandatanganan PPJT] untuk ruas Bengkulu–Lubuk Linggau. Ini bukan penambahan tugas karena HK [Utama Karya] membangun jalan tol Trans-Sumatra dari Sabang–Bakauheni," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (14/3).

Berdasarkan undangan peliputan dari Kementerian PUPR yang diterima *Bisnis*, Kamis (14/3), disebutkan bahwa pada hari ini dan Sabtu (16/3) Menteri PUPR akan melakukan kunjungan kerja ke Bengkulu.

Selain meninjau proyek infrastruktur di provinsi tersebut, Menteri PUPR akan melakukan penandatanganan PPJT Bengkulu–Lubuk Linggau.

Menurut Agung, pembangunan jalan

▶ **Jalan tol Bengkulu-Lubuk Linggau bukan merupakan tugas tambahan yang harus dilaksanakan oleh perseroan.**



tol Trans-Sumatra dikerjakan per ruas yang menjadi prioritas terlebih dahulu.

Adapun, untuk nilai investasi menunggu penandatanganan PPJT proyek tersebut terlebih dahulu. "Untuk kepastian tanda tangan dan nilai investasi belum bisa di-share karena masih di PU [Kementerian PUPR]."

Secara keseluruhan, ada 24 ruas jalan tol Trans-Sumatra dengan panjang keseluruhan 2.765 kilometer (km) yang akan dibangun. Pembangunan jalan tol Trans-Sumatra yang diserahkan kepada PT Utama Karya bakal menyedap investasi Rp176 triliun.

Menteri Basuki optimis ruas utama jalan tol Trans-Sumatra akan dapat ter-

sambung pada 2024.

Hingga kini, Utama Karya membangun 529 km jalan tol Trans-Sumatra dengan 47 km di antaranya sudah beroperasi penuh.

Beberapa ruas yang tengah dibangun adalah jalan tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung 189 km, ruas Padang–Sicincin (bagian dari jalan tol Padang–Pekanbaru) 31 km, Pekanbaru–Dumai 131 km, Kaalatanjung–Tebing Tinggi–Parapat 98 km, Medan–Binjai (Helvetia sampai Juraton Tanjung Mulla) 6 km, serta ruas Banda Aceh–Sigli 74 km.

BEROPERASI PENUH

Adapun, ruas yang sudah beropera-

Perjanjian Perusahaan Jalan Tol

Pasal 13

(1) Perjanjian perusahaan jalan tol (PPJT) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- lingkup pengusahaan;
- jangka waktu konsesi;
- perubahan masa konsesi;
- djaminan pelaksanaan;
- tarif dan mekanisme penyesuaian;
- hak dan kewajiban, termasuk alokasi risiko;
- standar kinerja pelayanan;
- pengalihan pemegang saham dan/atau susunan pemegang saham;
- sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan PPJT;
- pemutusan atau pengakhiran PPJT;
- laporan keuangan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan PPJT, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala

nasional;

l mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;

m. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam PPJT;

n. pengembalian infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Menteri;

o. keadaan memaksa; dan

p. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

(2) PPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan dengan jelas status kepemilikan aset yang diadakan selama jangka waktu konsesi, yaitu kepemilikan oleh Negara Republik Indonesia.

(3) Apabila Badan Usaha gagal melaksanakan PPJT sebelum masa pengoperasian maka jaminan pelaksanaan dapat dicairkan.

(4) Bahasa yang digunakan dalam PPJT adalah Bahasa Indonesia.

si penuh selain Bakauheni–Terbanggi Besar, adalah ruas Palembang–Indralaya 22 km dan Medan–Binjai seksi Binjai–Semayang dan seksi Semayang–Helvetia sepanjang 11 km.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit membenarkan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan PPJT untuk ruas tol Bengkulu–Lubuk Linggau.

"Kita kejar dalam waktu dekat penan-

datangan kontrak konsesi. Itu untuk Bengkulu–Lubuk Linggau. Tambahannya HK," ujarnya.

Danang menambahkan bahwa terdapat tiga segmen yang bisa dilakukan penandatanganan PPJT.

Namun, akhirnya penandatanganan PPJT dilakukan ruas Bengkulu–Lubuk Linggau terlebih dahulu. "Namun, yang minta didahulukan Bengkulu–Lubuk Linggau karena penlok [penetapan lokasi]-nya sudah." ■

Judul	Budapest Waterworks Investasi Proyek Air Bersih	Tanggal	Jumat, 15 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Perusahaan pengolahan air bersih asal Hungaria, Budapest Waterworks, mulai melakukan pembangunan proyek sistem air bersih di 34 wilayah di Indonesia.		

Budapest Waterworks Investasi Proyek Air Bersih

Bisnis, BUDAPEST — Perusahaan pengolahan air bersih asal Hungaria, Budapest Waterworks, mulai melakukan pembangunan proyek sistem air bersih di 34 wilayah di Indonesia. Total dana yang diinvestasikan dalam proyek itu senilai US\$34,60 juta.

Hal itu disampaikan oleh President of the Committee Hungarian Chamber of Commerce and Industry (Kadin Hungaria) Attila Galambos saat menerima rombongan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Budapest, Rabu (13/3) sore.

Galambos menyampaikan bahwa saat ini ada beberapa perusahaan Hungaria yang telah melakukan investasi di Indonesia.

“Salah satu paling utama adalah Budapest Waterworks yang bekerja sama dalam pengelolaan air bersih di Indonesia. Ini tindak lanjut dalam nota kesepahaman [*memorandum of understanding*] antara Indonesia dan Hungaria” ujar Galambos.

Selain itu, imbuhnya, terdapat dua perusahaan Hungaria yang berinvestasi di Indonesia, yaitu perusahaan telekomunikasi, Transelektro, dan perusahaan

farmasi, Diagon.

Area Manager Department for International Affairs Hungarian Chamber of Commerce and Industry Vegvari Kristof menyampaikan bahwa nilai investasi perusahaan pengelolaan air bersih tersebut paling besar dibandingkan dengan perusahaan lain.

“Budapest Waterworks saat ini proyeknya lagi jalan. Juga ada perusahaan Hungaria yang melakukan investasi di Indonesia di bidang pariwisata. Selain itu, ada investasi perusahaan farmasi, Diagon, sejak 20 tahun lalu yang juga memiliki pabrik di Indonesia,” ujar Kristof.

Investasi perusahaan air minum asal negara kaum Magyar ini merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán ke Indonesia pada Februari 2016.

Dalam kesempatan tersebut, kedua negara juga membahas, potensi kerja sama bilateral yaitu di bidang perdagangan dan investasi, pertanian, perikanan dan budi daya, energi, aplikasi nuklir, infrastruktur, teknologi informasi, ekonomi digital, keuangan dan perbankan, pendidikan, kebudayaan, serta isu kerja sama potensial lainnya.

Kunjungan BKSAP DPR RI ke Hungaria bertujuan meningkatkan kerja sama kedua negara dalam bidang ekonomi, khususnya perdagangan, prospek ekspor komoditas, pembangunan infrastruktur, investasi, hingga upaya peningkatan usaha kecil menengah.

“Tujuan dari kunjungan ini sebagai studi banding mengenai bagaimana kerja sama ekonomi regional berjalan di kawasan lain, selain di kawasan Asia Tenggara. Hambatan apa saja yang dihadapi dan bagaimana kerja sama ekonomi regional bisa secara optimal menguntungkan negara,” kata Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dave Akbarshah Fikarno.

Dalam pertemuan tersebut juga dipaparkan sejumlah prospek investasi dan ekspor yang bisa dilakukan di Hungaria.

Anggota Panja Kerja Sama Regional yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dwie Aroem Hadiatie menilai ekspor Indonesia ke Hungaria masih perlu ditingkatkan, terutama untuk komoditas tertentu, seperti kelapa dan produk olahannya mengingat ekspor Indonesia belum bisa memenuhi semua permintaan di negara itu. *(Hendri T. Asworo)*

Judul	Berita Foto	Tanggal	Jumat, 15 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Sejumlah kendaraan melintasi ruas tol Trans – Jawa di Kota Semarang, Jawa Tengah.		

► BIAYA PENGADAAN LAHAN



Bisnis/Triawanda Tirta Aditya

Sejumlah kendaraan melintasi ruas tol Trans-Jawa di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (13/3). PT Jasa Marga Tbk. mengaku masih merugi Rp1,5 triliun pascapembangunan tol Trans-Jawa ruas

Semarang-Batang yang diresmikan Desember 2018. Uang yang dipakai untuk biaya pengadaan lahan tersebut belum diganti.

Judul	Pesisir Selatan Anggarkan Rp 15 Miliar	Tanggal	Jumat, 15 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat mengalokasikan anggaran Rp 15 miliar untuk pembebasan lahan bagi pengembangan kawasan Ekonomi Khusus Mandeh.		

Pesisir Selatan Anggarkan Rp15 Miliar

Bisnis, PADANG — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat mengalokasikan anggaran Rp15 miliar untuk pembebasan lahan bagi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandeh.

Bupati Pessel Hendrajoni menyebutkan, pemerintah setempat menyiapkan anggaran Rp15 miliar untuk pembebasan lahan KEK Mandeh seluas 400 hektare di Bukik Ameh sesuai dengan yang direncanakan pemda.

"Rencananya seluas 400 hektare, kami anggarkan pembebasan lahan sebanyak Rp15 miliar, sekarang dalam proses [pembebasan lahan]," katanya, Kamis (14/3).

Menurutnya, luas lahan 400 hektare itu terdiri atas 200 hektare lahan milik nagari atau desa dan 200 hektare lagi sisanya adalah milik masyarakat.

Hendrajoni mengungkapkan, tim dari kabupaten tengah menghitung besaran ganti rugi yang harus dibayarkan khusus bagi

lahan milik masyarakat di lokasi KEK Mandeh tersebut.

"Kami upayakan pembebasan lahan selesai secepatnya, karena upaya mewujudkan KEK Mandeh ini tidak hanya menjadi urusan kabupaten dan provinsi, tetapi juga pemerintah pusat," ujarnya.

Selain mempercepat pembebasan lahan, pemda setempat juga akan membangun jalan menuju lokasi KEK sepanjang 4 kilometer dari jalan yang ada saat ini dengan lebar jalan mencapai 20 meter.

Kemudian, menyangkut analisis dampak lingkungan (amdal) dan kebutuhan lainnya akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

"Kami optimistis dengan persiapan yang dilakukan selama ini, perpres mengenai KEK akan segera diterbitkan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meminta agar koordinasi agar ditingkat-

kan atau pemkab lebih aktif untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan KEK Mandeh agar segera ditetapkan oleh pemerintah.

"Upaya pengembangan Mandeh ini terkesan masih sendiri-sendiri [provinsi dan kabupaten]. Kami ingin koordinasinya lebih ditingkatkan, sehingga fokus pengembangan yang diinginkan segera terealisasi," ujarnya dalam rapat antara Pemprov Sumbar dengan Pemda Pesisir Selatan, Senin (21/1).

KOORDINASI

Nasrul menyebutkan, seharusnya jika koordinasi berjalan dengan baik, KEK Mandeh sudah bisa ditetapkan pusat tahun ini.

Oleh karena itu, dia meminta perlu keseriusan bersama untuk mewujudkan KEK Mandeh, sehingga prioritas pengembangan pariwisata berjalan dengan baik, dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Jika memang ada rencana yang ingin diwujudkan oleh Pemkab Pessel [Pesisir Selatan], harusnya diusulkan dan dibahas bersama di provinsi," katanya.

Dia juga mengingatkan agar pengembangan kawasan pariwisata terpadu Mandeh berjalan sesuai rencana sehingga *detail engineering design* (DED) dan analisa dampak lingkungan (amdal) kawasan perlu dipercepat.

Adapun, KEK Mandeh direncanakan dibangun di kawasan Bukik Ameh, seluas 400 hektare, yang masuk dalam area kawasan wisata bahari Mandeh dengan total mencakup kawasan 18.000 hektare.

Nasrul menuturkan, sejumlah investor sudah menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di kawasan tersebut. Apalagi, posisi strategis Mandeh yang hanya butuh waktu 45 menit perjalanan darat dari Kota Padang. (Heri Faisal)

Judul	Jalan Rusak Sampai Jauh	Tanggal	Jumat, 15 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 10)		
Resume	Provinsi Sumatera Selatan yang dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya telah dikenal sebagai kawasan perdagangan sejak zaman daulu. Provinsi ini juga memiliki banyak tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi seperti Sungai Musi, Jembatan Ampera, Pulau Kemaro, Danau Ranau hingga kota Pagaralam. Sayangnya, provinsi ini juga dihinggapi masalah klasik yaitu jalan rusak yang bisa menurunkan minat perdagangan dan pariwisata.		



PROBLEM DAERAH

Jalan Rusak Sampai Jauh

Robby Arisanjaya, fotografer asal Batunaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, beranggota tak menyangka hasil jepretannya berdampak signifikan terhadap perbaikan jalan rusak hingga berlubang lumpur di daerah asalnya tersebut.

Dinda Wulandari
dinda.wulandari@bisnis.com

Tak tanggung-tanggung, respons tak hanya datang dari kepala daerah, Presiden RI Joko Widodo pun langsung memberi perintah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turun tangan memperbaiki jalan tak laik dilalui tersebut.

Karya foto Robby dapat kita telusuri di berbagai media sosial, terlihat ada sekitar 12 lembar foto yang diunggah Robby di akun Instagramnya.

Salah satu foto yang viral adalah model perempuan tampak berpose di dalam lubang berlumpur di tengah Jalan Batumarta, tangannya memukul air sehingga menghasilkan cipratan layaknya pose tengah berada di kolam renang.

"Tujuan saya dari foto-foto itu ingin protes [ke pemerintah] karena sudah lama sekali tidak diperbaiki," katanya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pemandangan jalan penuh lubang di daerahnya sudah lazim sehingga membuat pengguna jalan pun harus ekstra hati-hati manakala melewati jalan tersebut karena mengancam keselamatan pengenda-

gaimana caranya jalan ini bisa fungsional," kata Atianto saat meninjau jalan di Batumarta, Kabupaten OKU.

Menurutnya, Kementerian PUPR memang harus turun tangan untuk mengatasi kerusakan itu mengingat perbaikan jalan kabupaten masih dalam proses lelang.

Sembari menunggu pemenang lelang, Kementerian PUPR melakukan penambalan lubang dan menutup kubangan air dengan agregat, yakni batu dan pasir serta aspal.

"Yang penting masyarakat tidak celaka, dan jalan ini tidak mudah rusak agar bisa dilanjutkan pemeliharaannya oleh Pemkab," katanya.

PENYEBAB RUSAK

Pekerjaan ini diperkirakan selesai dalam 1 bulan untuk kemudian dituntaskan pemerintah kabupaten

Sepanjang Jalan Kerusakan

Provinsi Sumatera Selatan yang dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya telah dikenal sebagai kawasan perdagangan sejak zaman dulu. Provinsi ini juga memiliki banyak tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi seperti Sungai Musi, Jembatan Ampera, Pulau Kemaro, Danau Ranau hingga Kota Pagaralam. Sayangnya, provinsi ini juga dihinggapi masalah klasik yaitu jalan rusak yang bisa menurunkan minat perdagangan dan pariwisata.

Status Jalan di Provinsi di Sumatera Selatan

968,32 km mantap	544 km tidak mantap
Panjang Jalan: 1.513 km	

Anggaran Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan 2019

APBD Provinsi Sumsel	: Rp1,49 triliun
APBN	: Rp1,3 triliun
Dana Bantuan Gubernur	: Rp500 miliar
Total Anggaran	: Rp3,29 triliun
Total Kebutuhan	: Rp4,5 triliun

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Dina Marga (PUSM) Sumsel 2019, diolah

Dinda/Petricka Cahya Pratwi

Jalan Nasional karena khusus di Muba itu ada lima titik yang parah."

Kelima titik itu berada di Bayung Lencir sebanyak tiga titik, Babat Supat satu titik serta Sungai Lilin satu titik. Khusus di Sungai Lilin, jalan rusak berada tepat di depan pasar dan tercatat beberapa kali mobil tenguling.

"Memang setiap hari macet, tapi itu juga ada jam-jam tertentu. Apalagi kalau ada mobil tumbang di saat jam ramai, macet bisa sampai 4 jam lebih. Setelah berhasil kami evakuasi baru lancar lagi," imbuh Patih.

Kerusakan jalan nasional itu, imbuhnya, hanya dapat dilakukan perbaikan secara swadaya dan melibatkan warga serta perusahaan

ra di jalan raya.

Protes Robby menggunakan karya fotografi tersebut menuai hasil yang cukup melegakan masyarakat Batu Marit.

Selang satu pekan setelah fotografer itu mengunggah jepratannya di Instagram, rombongan Kementerian PUPR langsung menyambangi lokasi pemotretan pada Senin (4/3).

Sejumlah alat berat, seperti truk grinder telah disiapkan di lokasi untuk perbaikan jalan yang status wewenangannya di pemerintah kabupaten tersebut.

Direktur Preservasi Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Afianto Busono mengatakan Presiden Joko Widodo langsung menginstruksikan untuk mengatasi permasalahan yang telah viral di media sosial itu.

"Kami ke sini untuk membantu, ha-

setempat.

Afianto menilai bahwa penyebab kerusakan jalan di OKU karena adanya gonangan air di jalan yang sudah diaspal.

Oleh karena itu, dia melanjutkan pembuatan drainase atau saluran pembuangan air juga menjadi salah satu langkah untuk mengatasi persoalan tersebut.

Selain itu, adanya kendaraan yang melintas di luar batas tonase juga membuat jalan menjadi cepat rusak. Kondisi ini juga diperparah dengan cuaca yang sedang musim penghujan. "Sebenarnya aturan sudah ada, tinggal penegakan aturan saja."

Kondisi jalan rusak bukanlah perkara baru di wilayah Sumatra Selatan yang kaya akan sumber daya alam, seperti batu bara dan kelapa sawit itu.

Kerusakan serupa juga terjadi di ruas jalan lintas timur, tepatnya di Kecamatan

Bayung Lencir dan Sungai Lilin, Kabupaten Masi Banyuwangi.

Jalan nasional itu merupakan penghubung utama untuk lalu lintas kendaraan dari Sumsel menuju Jambi, dan sebaliknya.

Pedagang warung kelontong di Pasar Sungai Lilin, Lestari, mengatakan kerusakan jalan yang berada di depan warungnya itu sering menyebabkan kemacetan panjang. Apalagi, mobil truk sering 'tumbang' di tengah jalan akibat kondisi jalan yang penuh lubang itu.

"Kalau truk terguling di jalan ini sudah sering, bisa macet hingga 7 kilometer. Mobil lain tidak bisa gerak karena macet total 3 sampai 4 jam," katanya.

Menurutnya, warga pun pernah berinisiatif untuk memperbaiki jalan rusak itu secara swadaya, tetapi tak bertahan lama, jalan kembali rusak karena perbaikan yang ala kadarnya itu.

"Sudah lama ini rasanya. Sudah gotong royong diperbaiki, tetapi tetap rusak lagi. Sehari itu bisa 3 mobil-4 mobil yang tumbang," katanya.

Lestari mengatakan, pemandangan ratusan mobil yang melintas dan macet sampai 7 kilometer lebih adalah hal biasa. Warga punya jalan alternatif lewat perusahaan swasta jika ingin terhindari macet parah. "Alternatif ada lewat jalan perusahaan. Kondisi jalannya tanah, sepi dan mutar lebih jauh karena itu area perkebunan kepala sawit," katanya.

TITIK KERUSAKAN

Kepala Dinas Perhubungan Muba Fatih mengatakan jalan rusak di Jalan Lintas Timur (Jalintim) sudah terjadi sejak Hari Raya Idulfitri 2018. Namun, kerusakan parah terjadi dari 2 bulan terakhir.

"Rusak itu sudah dari Lebaran tahun lalu, tetapi kalau parahnya ya sejak Januari lah. Kami koordinasi dengan tim Balai

sekitar. Hal ini karena pemda tidak boleh memperbaiki jalanan yang rusak karena berstatus jalan milik negara. "Kami tidak bisa perbaiki pakai anggaran APBD, jalan negara. Salah kalau kami pakai APBD dan kami sudah koordinasi dengan BBPJK [Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional] V terkait untuk minta diperbaiki."

Sementara itu, Kepala BBPJK V Ki Agus Syaiful menyatakan ruas jalan yang rusak berat banyak berada di Sungai Lilin, Kabupaten Muba. Selain itu, ada pula di Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Namun, dia menyatakan, pihaknya memastikan seluruh ruas jalan Lintas Timur sudah mulus sebelum Lebaran 2019.

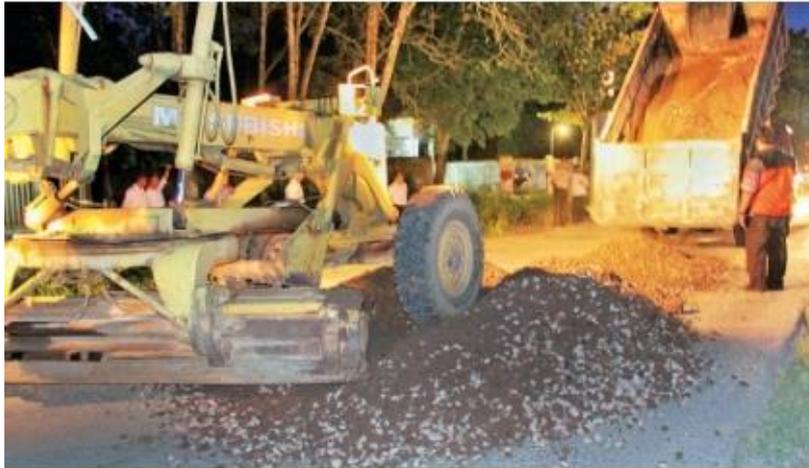
"Semuanya diperbaiki secara bertahap, targetnya selesai sebelum Lebaran. Saya pastikan nanti jalan Lintas Timur bisa mulus dan nyaman untuk dilalui," katanya.

Dia menjelaskan pemeliharaan Jalan Lintas Timur yang menjadi kewenangan pihaknya dengan budget APBN itu menghibungkan Sumsel dengan provinsi tetangga, yakni Jambi dan Lampung. Total panjang Jalan Lintas Timur 360 kilometer.

Syaiful menerangkan pihaknya telah mengalokasikan anggaran senilai Rp130 miliar yang digunakan untuk peningkatan jalan sepanjang 56 kilometer. Sementara itu, khusus untuk Jalan Lintas Timur, BBPJK V telah menyiapkan anggaran senilai Rp1,4 triliun untuk jalan sepanjang 351 km dari Jambi sampai Lampung.

"Kerusakan jalan dipengaruhi oleh hujur tapi kita harus jujur bahwa kendaraan ini juga mempengaruhi, kita lihat beban melebihi, padahal tonase jalan kita 10 ton, sementara yang lewat di atas 10 ton semua," katanya.

Jadi, problem kerusakan jalan akan terus mewarnai Bumi Sriwijaya, berapapun anggaran yang dikucurkan. □



Ditunggu, Badan Pengelola Dana Preservasi Jalan

Dinda Wulandari
dindawulandari@bbrns.com

Tugas perbaikan dan pemeliharaan jalan di Indonesia dibagi-bagi sesuai status jalan tersebut. Ada jalan kabupaten, jalan provinsi hingga jalan negara. Pengelompokan status jalan tersebut sering kali membuat pemerintah saling lempar tanggung jawab mana kala masyarakat mengeluhkan kondisi jalan rusak yang kerap mereka lalui.

Akademisi dari Universitas Sriwijaya Didik Susetyo mengatakan, persoalan jalan rusak sejatinya dapat

ditatasi asalkan semua pihak dapat duduk bersama atau tidak meributkan perihal pengelompokan jalan, yakni jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional.

Menurutnya, semua pihak harus sepakat bahwa infrastruktur jalan harus disediakan untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat untuk lintas orang dan lintas barang.

"Masyarakat itu tidak tahu, tahunya jalannya mulus, tapi di sisi lain, pemerintah juga terbentur aturan, misal pemerintah kabupaten memperbaiki jalan nasional maka menyalahi aturan pendanaan. Ini harus duduk bersama,"

katanya.

Oleh karena itu, dia menilai perlu ada lembaga khusus yang dibentuk bersama pemda maupun pusat untuk mengurus perbaikan jalan rusak yang sudah menjadi masalah menahun itu.

Dia menjelaskan lembaga itu dapat berada di bawah pemerintahan provinsi atau langsung berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk bersinergi dengan lembaga lain, seperti BUMN, swasta atau dana bantuan pihak ketiga.

"Nanti lembaga ini yang menjadi koordinator untuk membesarkan

persoalan jalan rusak, bisa disahkan melalui peraturan gubernur atau lainnya," katanya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (PUBM) Sumsel Darna Budhy menghitung butuh dana sebanyak Rp4,5 triliun untuk membuat seluruh jalan di Sumsel nyaman.

Namun, untuk tahun ini dana yang bersumber dari berbagai kantong pemerintah, baik APBD maupun APBN, masih tak mencukupi untuk keperluan itu. Meskipun, Gubernur Sumsel Herman Deru juga turut menggelontorkan dana bantuan gubernur senilai Rp500 miliar,

sehingga total dana untuk perbaikan jalan tahun ini baru senilai Rp3,29 triliun.

Dia memaparkan bahwa jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemprov terbentang sepanjang 1.523 km dengan jalan yang masuk kategori mantap alias mulus hanya 64% atau 968,32 km. Artinya masih ada 544 km lagi jalan milik provinsi yang tak nyaman untuk dilalui pengendara.

"Rusak itu karena kami keterbatasan dana untuk pemeliharaan. Selain itu memang seringkali beban yang melewati jalan itu tidak sesuai dengan desain jalan," katanya.